

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait
Kebebasan Berpendapat
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Filipina)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian Disertasi ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan di Filipina, 2) Untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat di Indonesia dan di Filipina, 3) Untuk merumuskan pembaharuan hukum pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat yang lebih ideal di Indonesia serta melakukan pembaharuan hukum (*legal reform*) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan: penelitian hukum normatif, terdiri dari tipe penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, historis, perbandingan hukum dan konseptual. Pengumpulan bahan dimulai dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan hukum materiil dan formil di Indonesia dan di Filipina. Hasil dari penelitian ini, adalah: 1) Pengaturan hukum tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat di Indonesia dan di Filipina sudah diatur, namun di Indonesia bertentangan dengan demokrasi, 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan mengingat kerugian korban tidak terpulihkan, 3) Harus adanya pemahaman tentang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya, tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang dimiliki oleh orang lain, serta pada penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat terlepas sebagai bagian dari bentuk kebebasan berpendapat, oleh sebab itu maka penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebaiknya diselesaikan dengan *restorative justice*.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Tindak Pidana, Kebebasan berpendapat.

**Criminal Liability Against Criminal Actors
Information Technology and Electronic Transactions Related to
Freedom of Expression
(Comparative Study of Indonesia and the Philippines)**

ABSTRACT

The research objectives of this dissertation are: 1) To analyze the regulation of criminal acts of information technology and electronic transactions related to freedom of expression in the criminal law system in Indonesia and the Philippines, 2) To analyze criminal liability for criminal acts of information technology and electronic transactions related to freedom of expression. in Indonesia and in the Philippines, 3) To formulate legal reforms governing criminal acts of information and electronic transactions related to freedom of expression that are more ideal in Indonesia and to carry out *legal reforms* (*legal reform*.) in Indonesia. The research method used: normative legal research, consists of research types on legal principles, legal systematics, legal comparisons, legal history and vertical and horizontal synchronization. The approach used is a legal, historical, comparative legal and conceptual approach. The collection of materials starts from primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials is carried out by interpreting material and formal laws in Indonesia and the Philippines. The results of this study are: 1) The legal arrangements for criminal acts of information technology and electronic transactions related to freedom of expression in Indonesia and the Philippines have been regulated, but in Indonesia it is against democracy, 2) Criminal liability for perpetrators of criminal acts of information and electronic transactions related to freedom opinion has been regulated in Article 27 paragraph 3 of the Law on Information and Electronic Transactions. The criminal responsibility does not reflect a sense of justice considering that the victim's losses are not recoverable, 3) There must be an understanding of the freedom to express an opinion that is owned by a person and is a human right, must not harm or violate the freedom and rights of others, as well as in the settlement of criminal acts. defamation through electronic media cannot be separated as part of the form of freedom of opinion, therefore the settlement of criminal acts of defamation through electronic media should be resolved by *restorative justice* .

Keywords: Criminal liability , Criminal Act, Freedom of opinion.